J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Wacana dan Kuasa Retorika Linguistik-Politik Agama dalam Gerakan Sosial Indonesia

Djilzaran Nurul Suhada[1], Rahmi Hidayati[2], Susvia Delta Kusdiane[3]
[1,3] Program Studi Sosiologi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Trimasda Cilegon
[2]Program Studi Pendidikan Non-formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email Korespondensi: djilzarannurul98@gmail.com

Article History:
Received: 30 Oktober 2024
Revised: 08 Desember 2024
Accepted: 13 Desember 2024

Keywords: *Bahasa, Retorika keagamaan, Politik identitas, Polarisasi sosial*

Abstract: *Artikel ini mengkaji interaksi kompleks antara bahasa, retorika, dan politik agama dalam konteks gerakan sosial di Indonesia pasca-Reformasi. Dengan fokus pada penggunaan wacana keagamaan dalam arena politik, penelitian ini mengungkap bagaimana kelompok-kelompok keagamaan memanfaatkan narasi agama untuk memobilisasi dukungan dan melegitimasi kepentingan politik mereka. Analisis mencakup transformasi penggunaan terminologi keagamaan dalam konteks politik, munculnya berbagai kelompok kepentingan berbasis agama, serta implikasi fenomena ini terhadap demokrasi Indonesia. Artikel ini juga membahas peran politik identitas dalam membentuk dinamika sosial-politik di Indonesia, termasuk potensi polarisasi dan tantangan terhadap pluralisme. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sifat pluralistik masyarakat Indonesia tetap menjadi faktor kunci dalam perkembangan demokrasi negara ini.*

PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era Reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam lanskap politik dan sosialnya. Salah satu aspek yang mengalami transformasi besar adalah hubungan antara agama dan politik, yang tercermin dalam berbagai gerakan sosial yang muncul dan berkembang selama periode ini. Reformasi membuka ruang bagi ekspresi politik dan keagamaan yang lebih bebas, yang sebelumnya dibatasi di bawah pemerintahan otoriter Suharto. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai gerakan sosial menggunakan unsur agama sebagai basis ideologis atau mengadopsi isu-isu keagamaan dalam agenda politik mereka. Fenomena ini tidak hanya menarik dari perspektif sosiologis dan politik, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi perkembangan demokrasi, bahasa, pluralisme, dan kohesi sosial di Indonesia (Hefner, 2011).

Studi tentang interseksi agama dan politik dalam gerakan sosial di Indonesia pasca-reformasi menjadi semakin relevan mengingat peningkatan visibilitas dan pengaruh kelompok-kelompok berbasis agama dalam ranah publik dan politik. Dari aksi-aksi massa berskala besar yang dimotivasi oleh sentimen keagamaan hingga munculnya partai-partai politik berbasis agama, fenomena ini telah membentuk kembali lanskap sosial politik Indonesia kontemporer. Oleh

karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika ini sangat penting untuk dapat menganalisis tren politik, sosial, dan keagamaan di Indonesia saat ini dan di masa depan (Menchik, 2016).

Rasanya, ide dan gagasan Foucault menjadi sangat relevan apabila kita membahas tentang wacana dan kuasa. Foucault memandang bahwasanya kekuasaan ini bukan sebagai entitas yang dimiliki oleh individu, melainkan sebuah relasi yang teraplikasi. Konsep ini menggambarkan bagaimana wacana keagamaan tidak hanya sebagai perefleksi, namun juga dapat membentuk realitas sosial dan politik. Konsep *Knowledge and Power* yang dikemukakan Foucault, seolah menegaskan bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling terkait erat sehingga sulit untuk dipisahkan (Hardiyanta, 2016). Dalam konteks Indonesia pasca reformasi, kita dapat melihat bagaimana pengetahuan agama digunakan untuk melegitimasi klaim kekuasaan tertentu. Misalnya, interpretasi teks keagamaan sering digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan publik, menunjukkan bagaimana *knowledge and power* bekerja dalam praktik sosial-politik.

Seperti yang telah kita alami dan baca dari berbagai sumber tertulis, semenjak pasca reformasi, kita banyak menyaksikan munculnya berbagai "rezim kebenaran" yang saling berebut kontrol, di mana kelompok-kelompok sosial dan politik Masyarakat berusaha mendefinisikan apa yang dianggap sebagai "kebenaran" dalam diskursus publik ini. Retorika agama sering digunakan untuk membangun dan mempertahankan rezim kebenaran, terutama dalam isu-isu sosial.

Tentunya, individu atau pun kelompok masyarakat dalam gerakan sosial di Indonesia telah mengadopsi dan menginternalisasi wacana dari agama yang mereka anut. Dalam proses ini, semua itu bukan hanya dapat membentuk identitas kolektif gerakan, akan tetapi dapat juga mempengaruhi cara individu dan kelompok tersebut memahami serta memposisikan dirinya dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. Seperti akan hal biasa dan lumrah, kita pasti pernah menyaksikan bagaimana wacana keagamaan kerap digunakan dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan tubuh dan moralitas (Foucault, 2019), seperti undang-undang tentang pornografi yang beberapa tahun lalu menjadi perdebatan riuh berskala nasional.

Dalam hal ini, kita harus mencermati kerangka untuk memahami bagaimana wacana keagamaan digunakan sebagai teknik pemerintahan, baik oleh negara maupun aktor non-negara (Burchel et al, 1991). Di Indonesia pasca reformasi, organisasi masyarakat sipil berbasis agama sering mengambil peran dalam mengarahkan perilaku masyarakat dan menunjukkan bentuk *governmentality* yang tersebar serta mengakar. Jadi apa yang disebut oleh Foucault sebagai *discursive formation* sangat penting untuk kita pahami, karena dari situ kita dapat diantarkan kepada pemahaman hasil identifikasi informasi yang muncul seputar isu pluralism agama, syariah, dan hubungannya dengan praktik kenegaraan. Nantinya formasi-formasi tersebut akan membentuk dan menggambarkan realitas sosial-politik kontemporer yang ada di Indonesia.

Dengan menelusuri akar historis dari wacana-wacana tertentu, kita dapat lebih memahami bagaimana kuasa retorika agama kontemporer dibentuk oleh kondisi-kondisi sosial, bahasa, politik, dan epistemologi sepanjang sejarah Indonesia. Dan hal-hal yang bersifat kuasa disini tidak selalu berkaitan dengan represifitas, justru wacana keagamaan juga berfungsi produktif untuk menciptakan identitas baru, memobilisasi massa, bahkan dapat membuka ruang-ruang resistensi terhadap kekuasaan dominan (Foucault, 2019).

Dalam kajian ini, Salah satu aspek linguistik-politik yang penting untuk dianalisis adalah penggunaan metafora dalam retorika keagamaan. Seperti yang dijelaskan oleh George Lakoff dan Mark Johnson (2008), bahwasanya metapora bukan hanya simbol dan alat retorik, akan tetapi ia dapat membentuk kerangka berpikir dan bertindak. Seperti halnya ketika kita mendengar atau membaca tulisan metafor “perang melawan maksiat” atau “membersihkan negara dari dosa”,

metafora-metafora ini bukan hanya menggambarkan realitas, tetapi juga membentuk metoda masyarakat memahami dan merespon isu-isu sosial-politik. Linguistik politik sebagai cabang dari analisis wacana kritis, berfokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai tujuan politik. Seperti halnya Indonesia pasca reformasi, analisis linguistik-politik terhadap retorika agama dalam gerakan sosial menjadi sangat penting untuk memahami dinamika kekuasaan yang kompleks.

Sebenarnya, Salah satu konsep kunci dalam linguistik-politik adalah apa yang disebut sebagai "nominalisasi", yang merujuk pada pengubahan kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda. Nominalisasi dapat berfungsi untuk mengaburkan agen dan tanggung jawab. Seperti halnya kita sebagai masyarakat Indonesia pasti sering mendengar atau melihat penggunaan nominalisasi dalam wacana keagamaan, misalnya "penistaan agama" atau "radikalisasi" (Fairclough, 2003). Penggunaan nominalisasi kata seperti penistaan agama dapat mengalihkan fokus dari tindakan spesifik dan pelaku ke konsep abstrak, sehingga memungkinkan mobilisasi massa tanpa perlu menjelaskan detail yang konkret.

Konsep presuposisi juga penting dalam analisis linguistik politik karena presuposisi merujuk pada asumsi implisit yang terkandung dalam suatu pernyataan. Presuposisi ini dapat diterapkan untuk memasukan ideologi ke dalam wacana atau bahasa tanpa harus secara eksplisit menyatakan wacana atau bahasa tersebut (Van Djik, 1998). Seperti halnya bagaimana presuposisi digunakan dalam wacana keagamaan. Misalnya, pernyataan seperti "kita harus kembali ke nilai-nilai Agama" mengandung presuposisi bahwa masyarakat telah menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Presuposisi semacam ini dapat membentuk pemahaman publik tanpa perlu argumen eksplisit.

Maka daripada itu, artikel ini berusaha sebisa mungkin mengkaji Wacana dan Kuasa Retorika Linguistik-Politik Agama dalam Gerakan Sosial Indonesia Pasca-Reformasi untuk dapat membuktikan hasil analisis dalam artikel ini relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer Indonesia secara luas dan mendalam. Entah soal bahasa atau wacana yang tertanam saat ini, ataupun gerakan-gerakan politik Masyarakat yang menggunakan unsur agama dalam aplikasinya. Kajian ini akan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi pada masa lalu dan juga yang sedang eksis saat ini, tentunya fenomena tersebut akan dipilah berdasarkan kesuaian ruang lingkup dalam artikel.

METODE PENELITIAN

Pengetahuan akan berkembang karena adanya penelitian. Begitupun dengan artikel ini yang membutuhkan banyak referensi dari karya tulis ilmiah terdahulu sebagai pembaharuan informasi dari masa ke masa. Pembahasan agama dan politik tentunya sudah banyak ditulis, artikel ini pun banyak mendapatkan wawasan dalam penulisannya melalui studi terdahulu. Ada beberapa artikel dengan tema yang sama yang digunakan sebagai referensi, diantaranya Islam Politik dalam Media Massa (Ayani, 2015), lalu Islam Nusantara dan Diskursus Politik: Analisis Wacana Kritis Berita di CNN Indonesia (Wafi, dkk, 2022), Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia (Qurtuby, 2018), dan Pertarungan Diskursif Islam Politik Dalam Wacana Penerapan Syariat Islam Pasca Orde Baru (Arizal, 2022).

Maka dari pada itu, penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) untuk menganalisis wacana dan kuasa retorika linguistik-politik agama dalam gerakan sosial Indonesia pasca reformasi. SLR dipilih karena metodenya mengintegrasikan temuan dari berbagai studi secara sistematis dan juga komperhensif (Keele, 2007). Strategi dalam pencarian literatur dilakukan pada buku dan juga

database yang menunjang data penelitian, seperti Google Scholar, SCOPUS, JSTOR, ELSEVIER, dan database lainnya yang data tersebut bisa dianggap kredibel karena informasi yang diambil bersumber dari database yang kredibel dan jelas. Penggunaan metode SLR ini, akan bertumpu pada kriteria seleksi dan eksekusi yang juga ditentukan berdasarkan pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Metadata (CAPS, 2018).

Sedangkan, kerangka konseptual yang dibangun dalam artikel ini memuat dua teori yang dinilai relevan dan mumpuni sebagai pisau analisa datanya. Teori tersebut adalah konsep relasi kuasa dari Michel Foucault serta pemikiran Norman Fairclough tentang Analisis Wacana Kritis. Pemilihan teori tersebut didasarkan pada kebutuhan akan landasan berfikir pada proses analisa hasil penelitian yang kredibel, sehingga layak menjadi sebuah karya tulis ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa, Retorika, dan Politik Agama dalam Gerakan Sosial

Agama, bahasa, dan politik telah lama terjalin dan saling berkelindan di negara yang terkenal dengan keberagaman agama dan bahasanya seperti Indonesia. Ekspresi politik identitas keagamaan telah menjadi wacana dominan, dan gerakan-gerakan berbasis Islam memainkan peran penting dalam berbagai era sejarah bangsa. Politik identitas, khususnya penggunaan agama, etnis, dan nasionalisme sebagai alat politik, telah digunakan baik oleh kelompok marjinal maupun dominan untuk memobilisasi gerakan dan merebut kekuasaan (Keddie, 1998).

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, yang ditandai dengan kasus "penistaan agama" terhadap gubernur petahana Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, menjadi contoh kuatnya peran retorika agama dalam politik Indonesia (Dalimunthe et al., 2020). Protes terhadap Ahok, yang dikenal dengan gerakan 411 dan 212, menyoroti kekuatan politik identitas Islam dalam menentang lawan politik kelompok yang memainkan hal ini. Namun, partai-partai nasionalis-sekuler juga tidak segan-segan menggunakan seruan keagamaan dalam kampanye mereka, hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh agama dalam lanskap politik Indonesia baru-baru ini (Assyaukanie, 2019). Kelompok-kelompok Islam di sini, menggunakan wacana agama untuk memobilisasi dukungan selama masa transisi demokrasi seperti pada momentum pemilihan umum.

Di luar ranah pemilihan umum, fundamentalisme agama juga terwujud dalam gerakan sosial, dengan munculnya politik identitas yang memberikan tantangan besar terhadap kelompok agama minoritas dan negara demokrasi Indonesia. Namun, kombinasi politik seolah terprogram dan identitas politik lokal dapat berfungsi sebagai kekuatan moderat, yang meredam dampak fundamentalisme agama tersebut (Harjanto, 2019).

Hubungan antara bahasa, retorika, dan politik agama dalam gerakan sosial telah menjadi perhatian signifikan. Banyak akademisi telah mengkaji bagaimana kelompok agama dan wacana mereka memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial dan politik, baik dalam hal mendukung maupun menentang struktur kekuasaan yang ada (Gorospe-Jamon, 1999). Beberapa organisasi-organisasi keagamaan seringkali menggunakan retorika yang terkesan netral atau universalis untuk mempromosikan posisi teologis dan ideologis mereka, sehingga motivasi mereka menjadi kurang transparan. Jadi kita perlu untuk memahami perberbedaan tentang interaksi kompleks antara ranah agama dan sekuler dalam wacana sosial dan politik (Williamson et al., 2022). Hefner (2011) pernah mengeksplorasi peran Islam dalam transisi demokrasi Indonesia. Ia menggambarkan bagaimana organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) berperan penting dalam mempromosikan demokrasi dan pluralisme. Dalam pembahasannya, Hefner juga menambahkan tantangan yang dihadapi oleh beberapa kelompok Islam dalam

menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.

Berbandingan dengan itu, Bahasa dan retorika yang sering menjadi alat utama dalam menyampaikan pesan dan mempengaruhi opini publik, memang benar adanya. Seperti halnya gerakan separatis di Aceh, mereka menggunakan narasi sejarah dan identitas etnis serta agama mereka untuk membenarkan perjuangan separatisme terhadap pemerintahan nasional Indonesia pada masa itu. Dalam tulisan Aspinall (2005), ia menganalisis gerakan separatis di Aceh dengan detail dan menjelaskan bagaimana Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menggunakan narasi sejarah untuk melegitimasi perjuangan mereka. GAM sering merujuk pada masa kejayaan Kesultanan Aceh dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda yang menggunakan narasi-narasi keagamaan seperti "Jihad" untuk membangun identitas yang berbeda dari Indonesia. Retorika dan wacana ini tidak hanya bertujuan untuk memobilisasi dukungan lokal, tetapi juga untuk mendapatkan simpati internasional. Politik agama juga dapat menjadi faktor signifikan, terutama di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Interaksi antara bahasa, retorika, dan politik agama seakan menciptakan dinamika yang kompleks sebagai konsekuensinya. Bahkan, populisme Islam di Indonesia sering kali memanfaatkan sentimen agama dan ketidakpuasan ekonomi untuk membangun basis dukungan untuk memenangkan kepentingan-kepentingan mereka akan hal apapun (Hadiz, 2016). Bahasa, retorika, dan politik agama banyak sekali mengambil peran penting di Indonesia, dari masa ke masa, mereka selalu dapat menunjukan eksistensinya melalui kelompok-kelompok keagamaan. Terlepas dalam aliran apa kelompok keagamaan ini mengaplikasikan narasi bahasa untuk kepentingannya, entah dalam aliran yang bersifat toleransi, atau pun aliran agama radikal.

Wacana Linguistik-Politik Agama dalam Gerakan Sosial Pasca-Reformasi

Sebagaimana yang dituliskan di atas, pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam lanskap politik dan sosialnya. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah wacana linguistik politik agama yang muncul dalam berbagai gerakan sosial. Masa ini ditandai dengan meningkatnya kebebasan berekspresi dan berserikat, yang memungkinkan munculnya berbagai kelompok kepentingan, termasuk juga kelompok-kelompok berbasis agama.

Fairclough (2007) dalam bukunya *Discourse and Contemporary Social Change,* menekankan bahwa wacana tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga aktif membentuknya. Ini sejalan dengan salah satu aspek yang menonjol dalam wacana, yaitu penggunaan terminologi dan konsep keagamaan untuk melegitimasi tuntutan politik atau sosial. Misalnya, penggunaan istilah "Jihad" yang awalnya memiliki makna religius, kini sering digunakan dalam konteks perjuangan politik atau sosial. Gerakan politik Islam menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk wacana linguistik politik agama pasca reformasi di indonesia. Munculnya kelompok-kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sudah dapat dipastikan aktif menggunakan retorika keagamaan dalam menyuarakan aspirasi politik mereka (Hasan, 2007). Maka inilah yang dimaksudkan Fairclough tentang wacana yang bukan hanya sekedar cerminan realitas, namun juga ia aktif membentuk realitas tersebut. Di sisi lain, kelompok-kelompok moderat dan progresif juga mengembangkan wacana tandingan yang mengedepankan interpretasi Islam yang lebih inklusif dan *compatible* dengan demokrasi. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memainkan peran penting dalam membentuk narasi Islam moderat di Indonesia (Bayat, 2013).

Dalam kehidupan masyarakat modern yang rumit, interaksi antara bahasa, politik, dan agama telah menjadi hal yang lumrah. Agama, sebagai bagian integral dari identitas budaya,

memiliki pengaruh yang tidak dapat dipisahkan terhadap lanskap politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa (Porter, 2003). Sedangkan bahasa, pada bagiannya, memainkan fungsi sebagai saluran yang mengalirkan ideologi agama dan politik diekspresikan, dinegosiasikan, dan disebarluaskan. Selain itu, pemahaman yang berbeda-beda mengenai demokrasi di kalangan pemimpin politik dapat menyebabkan terkikisnya demokrasi secara bertahap, karena demokrasi hanya sekedar menjadi komoditas pemilu belaka. Jadi ini berkonsekuensi juga pada pencitraan yang menggunakan bahasa keagamaan untuk melegitimasi diri dalam wacana politik (Kampf, 2015).

Wacana seputar hubungan antara bahasa, politik, dan agama memiliki banyak segi dan kompleks (Tunde & Benson, 2018). Aktor politik sering kali secara strategis menggunakan narasi-narasi serta wacana agama dan bahasa untuk meningkatkan daya tarik retoris dan kekuatan persuasif mereka (Khaghaninejad, 2015). Menavigasikan jaringan interaksi linguistik, politik, dan agama yang rumit ini memerlukan pendekatan yang berbeda dan tentunya kritis. Dengan mengkaji cara-cara penggunaan bahasa-bahasa agamis untuk kepentingan agenda politik, kita juga harus senantiasa dapat menjelaskan dinamika kompleks yang membentuk struktur sosial, budaya, dan politik suatu masyarakat.

Wacana seputar "Islam Nusantara" yang dikemukakan oleh Nahdlatul Ulama menjadi contoh menarik dari upaya untuk mengembangkan narasi islam khas Indonesia dan melawan pengaruh interpretasi Islam transnasional yang dianggap kurang sesuai dengan konteks lokal. Namun tentunya, ketika islam Nusantara telah menjadi wacana publik, menimbulkan banyak sekali penilaian yang beragam entah itu pro maupun kontra. Salah satu kontrofersi yang timbul, ialah banyaknya anggapan bahwa islam Nusantara merupakan bentuk dari islam jenis baru yang bahkan sampai saat ini, kontrofersi itu terus berlanjut. Pada saat itu, Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh salah satu petinggi organisasi tersebut yaitu Said Aqil Siraj turut melakukan perlawanan argumen yang dimana ia mengemukakan bahwa “Islam Arab” lebih mengedepankan “arabisasi” daripada “islamisasi” (Sururi, 2019). Pertarungan wacana dalam kasus polemik islam Nusantara yang merupakan gerakan politik dari Nahdlatul Ulama terjadi karena semua pihak yang terlibat ingin terus mempertahankan dan memperebutkan kuasa atas wacana yang akan diyakini oleh Masyarakat.

Pada mulanya, politik identitas termasuk kepada penggunaan wacana keagamaan, sebagian besar didorong oleh kelompok-kelompok marginal dan berhaluan kiri yang berupaya mempropagandakan keadilan dan kesetaraan. Namun, seiring berjalannya waktu, politik identitas meluas dan diadopsi kelompok sayap kanan yang juga terlibat dalam penggunaan narasi agama, etnis, dan nasionalisme secara strategis untuk memobilisasi gerakan dan merebut kekuasaan (Dalimunthe et al., 2020). Banyak kontradiksi yang tampak ini menyoroti sifat wacana yang kompleks dan multifaset seputar linguistik politik-agama dalam gerakan sosial Indonesia pasca-Reformasi. Perang wacana agama dalam politik bukanlah fenomena baru, karena telah ada bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, dengan hubungan antara kekuatan politik identitas agama dan negara yang hadir di sepanjang berbagai era sejarah negara ini.

Kuasa Retorika Linguistik-Politik Agama

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, Dalam lanskap politik kontemporer di Indonesia, penggunaan retorika yang mengintegrasikan bahasa dan simbol keagamaan telah menjadi fenomena yang semakin menonjol dan signifikan. Fenomena ini tidak hanya merefleksikan dinamika sosial-politik yang kompleks, tetapi juga berpotensi membentuk dan mengonstruksi realitas sosial masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk (Muhtadi, 2019). Penggunaan

wacana keagamaan dalam konteks politik telah mengalami transformasi sejak era Reformasi, dengan intensitas dan kompleksitas yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya demokrasi di Indonesia.

Pada pemilihan presiden 2019, dengan petahana Joko Widodo, memang dapat meningkatkan dukungan dari kelompok agama minoritas dan Muslim populis, sementara lawannyanya yang otoriter-populis, Prabowo Subianto, didukung oleh kelompok-kelompok yang lekat akan peran Islam yang lebih besar dalam kehidupan politik (Zainuddin, 2015). Polarisasi sosial keagamaan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi demokrasi Indonesia. Adanya kekuatan politik yang diberikan kepada kelompok-kelompok islam populis sudah menyebabkan pemerintahan Joko Widodo mengandalkan langkah-langkah yang semakin tidak bebas untuk mengatasi permaslaahan yang terjadi, dan inilah yang merusak beberapa pencapaian demokrasi Indonesia dalam prosesnya (Aspinall & Mietzner, 2019).

Kemunduran demokrasi di Indonesia dibuktikan dengan menurunnya daya saing elektoral, bangkitnya populisme otoriter, dan penggunaan undang-undang oleh pemerintah untuk membatasi oposisi politik. Namun, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran pentingnya dalam mempertahankan demokrasi Indonesia, dengan bertindak sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan mencegah kemunduran demokrasi yang berbahaya (Baidhowa, 2021).

Sebenarnya secara keseluruhan, retorika strategi politik-keagamaan di Indonesia pasca-Reformasi telah menjadi fenomena yang kompleks dan terus berkembang juga berulang, dibentuk oleh sifat pluralistik dan ketegangan antara kaum pluralis dan Islamis. Akan tetapi, meskipun menghadapi tantangan dan juga permasalahan ini, masyarakat Indonesia yang pluralistik sudah cukup menjadi faktor penting dalam pembangunan demokrasi negara tersebut. Ketika Indonesia terus menavigasi kompleksitas lanskap politik-keagamaannya, peran retorika dan komunikasi dalam membentuk wacana politik negara tersebut akan menjadi penting.

Dalam hal ini, ketika kita menggunakan analisis dimensi tekstual, pola-pola linguistik yang konsisten dalam penggunaan bahasa agama dalam wacana politik akan terlihat sangat jelas. Seperti misalnya; Penggunaan metafora keagamaan tentang politisi yang kerap menggunakan metafora yang berakar pada tradisi keagamaan untuk membingkai isu-isu politik (Aspinall, 2020). Misalnya, penggunaan istilah "jihad" untuk menggambarkan upaya perlawanan terhadap apapun yang berpotensi menghalangi jalan politiknya.

Selain itu, adanya intertekstualitas dengan teks-teks dari ayat suci suci yang sering digunakan untuk melegitimasi posisi politik tertentu membuat teks sangat kuat untuk membingkai politik identitas (Hefner, 2018). Penggunaan dikotomi sakral-profan seperti wacana politik sering dibingkai dalam kerangka pertentangan antara yang "suci" dan yang "duniawi", juga menciptakan polarisasi moral dalam isu-isu politik (Hadiz, 2016). Penguatan politik identitas telah memperkuat dinamika politik di Indonesia, yang juga seringkali mempertajam garis pemisah antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat (Mietzner, 2020).

KESIMPULAN

Penggunaan retorika keagamaan dalam politik Indonesia pasca-Reformasi merupakan fenomena yang kompleks dan signifikan, mencerminkan dinamika sosial-politik yang rumit di negara yang beragam seperti Indonesia. Bahasa, retorika, dan politik agama saling terkait erat dalam membentuk gerakan sosial dan wacana politik di Indonesia, dengan kelompok-kelompok keagamaan menggunakan narasi agama untuk memobilisasi dukungan dan melegitimasi kepentingan politik.

Wacana linguistik-politik agama pasca-Reformasi ditandai dengan munculnya berbagai

kelompok kepentingan berbasis agama, baik yang moderat maupun yang lebih radikal, yang aktif menggunakan retorika keagamaan dalam arena politik. Penggunaan terminologi dan konsep keagamaan dalam konteks politik juga telah mengalami transformasi, dengan istilah-istilah seperti "jihad" sering digunakan dalam perjuangan politik atau sosial.

Politik identitas, termasuk penggunaan wacana keagamaan, telah menjadi strategi yang digunakan oleh berbagai kelompok, baik marginal maupun dominan, untuk memobilisasi dukungan dan meraih kekuasaan. Fenomena ini memiliki implikasi signifikan terhadap demokrasi Indonesia, termasuk potensi polarisasi sosial, tantangan terhadap pluralisme, dan upaya pemerintah untuk membatasi oposisi politik. Meskipun menghadapi tantangan besar, sifat pluralistik masyarakat Indonesia tetap menjadi faktor penting dalam perkembangan demokrasi di indoensia.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia*. Johns Hopkins University Press, 30(4), 104-118. https://doi.org/10.1353/jod.2019.0055

Aspinall, E. (2020). *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford University Press.

Assyaukanie, L. (2019). Religion as a Political Tool: Secular and Islamist Roles in Indonesian Elections. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 454-479.

Baidhowa, A R. (2021). *Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding*., 7(1), 124-124. https://doi.org/10.31078/consrev715

Bayat, A. (2013). *Post-Islamism: The many faces of political Islam*. Oxford University Press.

Burchell, G., Gordon, C., & Miller, P. (1991). *The Foucault effect*: Studies in governmentality.

CASP, C. (2018). *CASP qualitative checklist*. Critical Appraisal Skills Programme.

Dalimunthe, S. F., Ardika, I. W., Putra, I. N. D., & Arjawa, I. G. B. S. (2020). Politics of Identity and the Case of Ahok's Religion Blasphemy in the 2017 DKI Jakarta Election. *E-Journal of Cultural Studies*, 13(1), 15-21.

Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse* (Vol. 270). London: routledge.

Fairclough, N. (2013*). Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge.

Foucault, M. (2019). *The history of sexuality: 1: the will to knowledge*. Penguin UK.

Gorospe-Jamon, G. (1999). The el shaddai prayer movement: Political socialization in a religious context. *Philippine Political Science Journal*, *20*(43), 83-126.

Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.

Hardiyanta, P. S. (2016). *Disiplin Tubuh; Bengkel Individu Modern*. Lkis Pelangi Aksara.

Harjanto, I. (2019). Identity and programmatic politics in a Javanese village head election: The case of Temon Kulon, Yogyakarta. *PCD Journal*, 7(2), 225-253.

Hasan, N. (2007). *Islamic militancy, Sharia, and democratic consolidation in post-Suharto Indonesia*. RSIS Working Paper, No. 143. Singapore: Nanyang Technological University.

Hefner, R. W. (Ed.). (2018). *Routledge handbook of contemporary Indonesia*. Routledge.

Hefner, R. W. (2011). *Civil islam: Muslims and democratization in indonesia*. Princeton University Press.

Keddie, N. R. (1998). The new religious politics: where, when, and why do "fundamentalisms"

appear?. *Comparative studies in society and history*, 40(4), 696-723.

Keele, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering (Vol. 5).* Technical report, ver. 2.3 ebse technical report.

Khaghaninejad, M. S. (2015). Political practice of literary analysis: how to read literature more closely. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, *49*, 92-105.

Kusmidi, H. (2023). *An Overview of Islam and Religious Moderation: Concept, Principles, and Indicators*., 22(2), 168-168. https://doi.org/10.29300/syr.v22i2.8752

Lakoff, G., & Johnson, M. (2008). *Metaphors we live by*. University of Chicago press.

Menchik, J. (2016). *Islam and democracy in Indonesia: Tolerance without liberalism*. Cambridge University Press.

Mietzner, M. (2020). *Authoritarian Innovations: Crafting Support for a Less Democratic Southeast Asia*. East-West Center.

Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan.

Porter, B. (2003). Thy kingdom come: Patriotism, prophecy, and the catholic hierarchy in nineteenth-century Poland. *The Catholic historical review*, *89*(2), 213-239.

Sururi, Z. (2019). Polemik Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Konsep Islam Nusantara Analisis Framing Robert N. Entman Media Online: Detiknews.com, CNNIndonesia.com, dan Kompas.com. *Kalijaga Journal of Communication*, 1(1).

Tunde, A. H., & Benson, P. (2018). ANALYSIS OF DISCOURSE STRATEGIES AND IDEOLOGIES IN THE INAUGURAL SPEECHES OF BARRISTER IBRAHIM SHEHU SHEMA. *Ahyu: A Journal of Language and Literature*, *2*, 120-127.

Thoyib, M., Subandi, S., & Harsoyo, R. (2021). *Managing Multicultural Islamic Education through Conflict Resolution Learning Development in Indonesia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 6(2), 409-421. https://doi.org/10.24042/tadris.v6i2.10330

Van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A multidisciplinary approach.* Sage Publication.

Williamson, S., Yildirim, A. K., Grewal, S., & Kuenkler, M. (2023). Preaching politics: How politicization undermines religious authority in the middle east. *British Journal of Political Science*, 53(2), 555-574.

Zainuddin, M. (2015). *PLURALITY OF RELIGION: Future Challenges of Religion and Democracy in Indonesia*. Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, 9(2), 151-151. https://doi.org/10.15642/jiis.2015.9.2.151-166